

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh Sri Lanka yang terus menumpuk setiap tahunnya telah mendorong Sri Lanka berada dalam kondisi kebangkrutan. Banyak faktor yang menyebabkan Sri Lanka gagal dalam mengelola keuangan negaranya, seperti kebijakan ekonomi yang salah, pengelolaan utang yang buruk, korupsi, krisis pariwisata akibat pandemi COVID-19, serta ketergantungan akan impor merupakan beberapa faktor yang dinilai telah mengantarkan Sri Lanka menghadapi krisis ekonomi.

Situasi ekonomi di Sri Lanka saat ini belum sepenuhnya stabil, sehingga masih banyak strategi yang harus dijalankan dalam mengatasi krisis tersebut. Tentu saja kondisi ini akan sangat menantang bagi Kabinet Wickremasinghe dan diperlukan upaya lebih lanjut untuk pemulihan penuh. Namun adanya ketidakstabilan politik yang kerap melanda Sri Lanka dapat menjadi hambatan tersendiri untuk pemulihan ekonomi. Pemerintahan yang stabil diperlukan untuk menetapkan agenda dan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan negara.

Pemerintahan Wickramasinghe akan menghadapi tantangan berat untuk secara aktif menyeimbangkan ekspektasi ekonomi politik dalam negeri dengan kebijakan ekonomi yang sehat sekaligus menavigasi agenda geopolitik yang bersaing untuk mencapai hasil perekonomian yang lebih baik bagi negara

tersebut. Tugas berat ini akan membawa konsekuensi yang signifikan, karena jika pemerintah gagal dalam merumuskan kebijakan, hal ini berpotensi menjerumuskan Sri Lanka ke dalam jurang perekonomian yang semakin dalam. Selain itu juga dari segi pertahanan, Wickramasinghe harus lebih tegas dalam menjaga kedaulatan teritorialnya di sekitar Pelabuhan Hambantota.

Untuk mengatasi krisis ekonomi, Pemerintah Sri Lanka meminta bantuan International Monetary Fund (IMF). International Monetary Fund telah berperan penting dalam merespon krisis ekonomi Sri Lanka tahun 2022 melalui konsep peran organisasi internasional dan rezim internasional. IMF telah memberikan bantuan keuangan yang tepat dan nasihat kebijakan untuk membantu Sri Lanka dalam menstabilkan keuangannya, serta merestruksasi kembali pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Terdapat beberapa strategi dan bantuan yang direkomendasikan oleh IMF seperti pengaturan perpanjangan akses selama 48 bulan di bawah *Extended Fund Facility* (EFF), dengan akses ke sumber dana sebesar 2,286 miliar SDR (395 persen kuota, atau sekitar US\$3 miliar). Fokus program adalah sebagai berikut: (i) konsolidasi fiskal berbasis pendapatan yang kuat, yang mencakup penguatan jaring pengaman sosial, reformasi kelembagaan fiskal, dan penetapan harga energi berbasis pemulihan biaya; (ii) pemulihan keberlanjutan utang publik, termasuk restrukturisasi utang; (iii) strategi multi-cabang untuk memulihkan stabilitas harga dan meningkatkan fleksibilitas nilai tukar cadangan; dan (iv) kebijakan untuk menjaga stabilitas harga tetap. Kebijakan tindakan yang merupakan kunci untuk mengatasi akar penyebab krisis dan membangun kepercayaan selama fase

stabilisasi awal, seperti pengukuran pendapatan dan bank sentral otonomi, akan dilaksanakan di muka. Reformasi yang membangun institusi jangka panjang untuk memastikan stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan utang akan diterapkan

IMF juga membantu memfasilitasi dialog dan kerjasama antar Sri Lanka dengan para kreditur agar tempo pembayaran utang dapat diperpanjang. Sri Lanka mempunyai peluang untuk memulihkan stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonominya. Presiden Wickremesinghe harus mulai membentuk bank sentral yang independen, serta merestrukturisasi badan usaha milik negara, dan memperluas ekspor dalam perdagangan internasional. Kontribusi IMF dalam mengatasi Krisis Sri Lanka tentu nyata, melalui serangkaian strategi yang komprehensif dan juga dana pinjaman EFF. Namun untuk sampai saat ini Sri Lanka masih belum sepenuhnya terlepas dari jeratan utang dan inflasi. Namun kondisi perekonomian Sri Lanka semakin membaik sejak adanya peran IMF disana.

5.2. Saran

Sri Lanka harus berkomitmen untuk mengikuti saran dari IMF untuk melakukan reformasi ekonomi secara struktural agar dapat mencapai stabilitas ekonomi dalam jangka Panjang. Kegagalan Sri Lanka seharusnya menjadi cerminan bagi negara-negara berkembang, untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan dana pinjaman luar negeri. Jika suatu negara terlalu ketergantungan akan investor asing dan pinjaman luar negeri, dikhawatirkan hal ini akan menjadi awal dari kebangkrutan negara karena menumpuknya utang yang tidak diseimbangi dengan pemasukan yang besar akan membuat sebuah negara gagal dalam membayar utang luar negerinya. Sudah sepatutnya Sri Lanka

lebih bijak lagi dalam mengatur keuangan negaranya agar tidak berdampak luas
mempengaruhi negara-negara lain.

